

**EVALUASI PROGRAM NAGARI TANGGUH BENCANA
DI NAGARI AMPIANG PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



OLEH :

META MELANI FERNANDES
16042146/2016

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari
Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir
Selatan
Nama : Meta Melani Fernandes
NIM/TM : 16042146/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Agustus 2020

Disetujui oleh,
Pembimbing



Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA
NIP. 198406062008121003

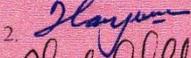
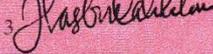
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 04 Agustus 2020 Pukul 13.00 WIB s/d 14.30 WIB
**Evaluasi Program Nagari Tangguh Bencana Di Nagari Ampiang Parak
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Meta Melani Fernandes
NIM/TM : 16042146/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Agustus 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	1. 
Anggota	Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	2. 
Anggota	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP




Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal".
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

"...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa..." - 5cm.

Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku

Allhamdulillahirabbil 'alamin... Allhamdulillahirabbil 'alamin...
Allhamdulillahilalamin...
Akhirnya aku sampai ke titik ini,
sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb
Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada Mu ya Rabb
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagi ku dan menjadi kebanggaan
bagi keluargaku tercinta
Ku persembahkan karya mungil ini...
untuk belahan jiwaku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukan lah siapa-siapa
di dunia fana ini Ibundaku tersayang (YUSNIATI)
serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang
bertampahi dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak
pernah ku ketahui,
namun tenang temaram dengan penuh kesabaran
dan pengertian luarbiasa Ayahanda ku tercinta (ZULHAINAN)
yang telah memberikan segalanya untukku
Kepada Kakak-kakakku (Benny S fernandes), (Yessa Rifa fernandes), terima kasih tiada tara
atas segala support yang telah diberikan selama ini
Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang
siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa keberuntungan. Jika hidup bias
kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk ku ucapkan
terima kasih... :)

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meta Melani Fernandes
NIM/TM : 16042146/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Nagari Tangguh Bencana Di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Meta Melani Fernandes

2016/16042146

ABSTRAK

**Meta Melani Fernandes
2016/16042146:**

**Evaluasi Program Nagari Tangguh
Bencana Di Nagari Ampiang
Parak Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu program nagari tangguh bencana, mengevaluasi atau menilai program tersebut apakah berjalan secara optimal dan apakah program tersebut layak untuk terus dijalankan. Program nagari tangguh bencana bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana dan upaya penyelamatan diri secara mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, panduan wawancara berupa butiran-butiran pertanyaan yang telah disiapkan, alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah kamera, HP, dan alat rekaman. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program nagari tangguh bencana yang dijalankan di nagari ampiang parak belum berjalan secara optimal dan tujuan dari program tersebut belum tercapai secara keseluruhan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Nagari Tangguh Bencana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Program Nagari Tangguh Bencana Di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”**. Tujuan penulis menulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Seluruh kegiatan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ganefri,M.Pd.,Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr.Siti Fatimah,M.Pd.,M,Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi,SH.,M,Hum,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Adil Mubarak,S.IP.,M,Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr.Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs.Karjuni Dt Maani, M.Si, Bapak Dr.Hasbullah Malau, S,Sos.,M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yef Indra,SH selaku Kabid PK dan Seluruh Staf BPBD(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian

8. Bapak Yendri Selaku Sekretaris Nagari Ampiang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian
9. Bapak Irwan desrinaldi selaku Ketua KSB Nagari Ampiang Parak yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian
10. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang sangat penulis cintai, yang sudah memberikan kekuatan kepada penulis, terima kasih untuk doa, kepercayaan dan pengorbanannya.
11. Untuk temanku Najmi laila terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini
12. Untuk temanku Mutia aprila erman terima kasih sudah menemani dalam proses pengambilan data untuk penyelesaian skripsi ini
13. Buat teman-teman Ilmu Administrasi negara 2016, “Terima Kasih untuk kebersamaannya“.

Semoga petunjuk dan motivasi yang bapak, ibu dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Padang, juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Pengertian Evaluasi.....	12
3. Pengertian Program.....	13
4. Pengertian Evaluasi Program	14
5. Konsep Manajemen Kebencanaan.....	17
6. Konsep Analisis SWOT	26
B. Kerangka Konseptual.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31

D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Fokus Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
H. Instrument Penelitian	34
I. Teknik Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	37
B. Temuan Khusus	45
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah penduduk Nagari Ampiang Parak	5
Tabel 1.2 Kampung yang Berada di Zona merah.....	6
Tabel 2.1 Indikator evaluasi program model CIPP	17
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	31
Tabel 4.1 Kondisi sosial nagari ampiang parak	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Peta administrasi Nagari Ampiang Parak kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan	39
Gambar 4.2 Peta resiko bencana nagari ampiang parak.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam di dunia, demikian menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR, Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Resiko Bencana). Berbagai bencana alam mulai gempa bumi tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanahlongsor, kekeringan, dan kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. Bahkan Indonesiamenduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan risiko dan dampak bencana alam tertinggi di dunia, (Pramono, 2015)

Secara Geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada, 0059'–2028,6' lintang selatan dan 100019'–101018' Bujur Timur yang membujur dari Utara keselatan dengan panjang garis pantai 287,2 km, tinggi dari permukaan laut 0-1000 meter, mempunyai luas 5.749,89 Km², luas perairan laut 84.312 km². Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) memetakan sebelas dari 15 kecamatan di kabupaten tersebut yang berada di daerah rawan tsunami dengan jarak dua sampai empat kilometer dari garis pantai. dari 15 kecamatan tersebut hanya empat kecamatan yang bebas dari ancaman tsunami, sebelas berada di sepanjang garis pantai dan rawan tsunami. Selain rawan tsunami, Pesisir Selatan juga rentan terhadap Bencana-Bencana Alam lainnya seperti Longsor, Banjir, Abrasi Pantai dan sebagainya.

Sesuai dengan UU No 24 Th 2007 Pasal 1 (14) Rawan Bencana Merupakan:

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Untuk mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi jika bencana tersebut datang maka pemerintah harus membentuk program Pengurangan Resiko Bencana. Sekeras apapun usaha dari pemerintah untuk mengurangi resiko bencana tersebut tidak akan bisa berhasil jika masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tersebut tidak mengerti tentang bahaya bencana dan cara penanggulangan pada saat terjadi bencana tersebut. oleh sebab itu pemerintah membentuk suatu program Pengurangan Resiko Bencana yang berbasis masyarakat yaitu dengan membangun Desa/Nagari Tangguh Bencana.

Pengurangan risiko bencana dinagari merupakan langkah dasar dalam menyusun perencanaan terkait penanggulangan bencana. Untuk tingkat nagari, hal ini dilakukan demi terwujudnya nagari tangguh bencana. Aturan yang melandasinya merujuk kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana. Desa/nagari Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran LSM dan organisasi masyarakat.

Salah satu Nagari yang rentan terhadap Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Nagari Amping Parak. selain sebagai Nagari Ekowisata yang terkenal dengan banyaknya pohon cemara yang tersusun rapi di sepanjang pelataran pantainya, Nagari ini juga sudah menjadi Nagari Tangguh Bencana sejak hadirnya lembaga sosial dari Jerman, Arbieter-Samariter-Bund (ASB) di Nagari Ampiang Parak pada tahun 2014. Setelah diterapkan program Nagari Tangguh Bencana masyarakat sekitar mulai mengenal tentang pengurangan resiko bencana. Masyarakat diberikan pelatihan, dan semua mulai sadar, bahwa Pohon Cemara dan Mangrove yang ditanam bisa mengurangi hempasan gelombang ke daratan. Nagari Ampiang Parak ingin menjadi nagari Ekowisata dan Tangguh Bencana. Nagari Ampiang Parak yang terdiri dari enam kelurahan/kampung itu, warganya sudah mulai terlatih dan siap jika sewaktu-waktu bencana gempa bumi ataupun tsunami terjadi.

Ada beberapa permasalahan yang di temui di lapangan berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yendri selaku Sekretaris Nagari Ampiang Parak, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Program Nagari Tangguh Bencana pada tahun 2019 sudah menggunakan dana desa, namun untuk menjalankan program pengurangan resiko bencana tersebut juga butuh perhatian dari pihak pemerintah, akan tetapi pembinaan terhadap masyarakat tentang pengurangan resiko bencana dari tingkat Kebuatannya masih kurang, jika tidak di undang dari pihak Nagari pihak BPBD tidak datang untuk memberi pelatihan kepada masyarakat, padahal Masyarakat di Nagari Ampiang Parak memiliki SDM yang masih rendah sehingga memerlukan pembinaan dari pemerintah. mungkin kendala yang terjadi di tingkat Kabupaten yaitu masalah anggaran.

Selain masalah dari tingkat Kabupaten, Bapak Yendri juga menjabarkan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam Program Nagari Tangguh Bencana sebagai berikut:

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana dapat kita bagi dalam 3 kelompok, yang pertama ada masyarakat yang paham tentang penanggulangan bencana karena mendapatkan pelatihan dan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana, yang kedua ada masyarakat yang enggan untuk mengikuti pelatihan pengurangan resiko bencana terkait dengan kepercayaan, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang tidak mau tau sedikit pun tentang program dan pelatihan pengurangan resiko bencana.

Suatu Nagari bisa di sebut sebagai Nagari Tangguh Bencana harus memenuhi 20 indikator berdasarkan indikator DESTANA (Desa Tangguh Bencana), namun di Nagari Ampiang Parak belum bisa memenuhi semua indikator tersebut. tantangan untuk memenuhi indikator tersebut supaya program Nagari Tangguh bencana bisa berjalan dengan baik ialah anggaran dan juga keterlibatan dari tiga komponen lembaga yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Di Nagari Ampiang Parak sudah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang beranggota kurang lebih 50 orang yang merupakan perwakilan dari 6 kampung.

20 indikator Desa Tangguh Bencana menurut Perka BNPB No 1 Tahun 2012

1. Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
2. Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontingensi
3. Forum PRB
4. Relawan Penanggulangan Bencana
5. Kerjasama antar pelaku dan wilayah
6. Dana tanggap darurat
7. Dana untuk PRB
8. Pelatihan untuk pemerintah desa
9. Pelatihan untuk tim relawan
10. Pelatihan untuk warga desa
11. Pelibatan/partisipasi warga desa

12. Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
13. Peta dan kajian risiko
14. Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
15. Sistem peringatan dini
16. Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
17. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
18. Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
19. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
20. Perlindungan aset produktif utama masyarakat

Secara keseluruhan, jumlah warga yang mendiami Nagari Ampiang Parak sebanyak 9.348 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Nagari Ampiang Parak

No	Kampung	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Alai	489	738	1.227
2	Pasar Ampiang Parak	1.118	1.037	2.155
3	Padang Tae	1.034	827	1.861
4	Ujung Air	681	676	1.357
5	Padang lawe	873	586	1.459
6	Koto Tarok	782	589	1.371
	Jumlah	4.878	4.470	9.348

Menurut Haridman Ketua Laskar Turtle Camp Nagari Ampiang Parak, yang juga pengiat dalam tim Penanggulangan Bencana (PB) Nagari Ampiang Parak tergolong rentan terhadap bencana. Sebab, lokasi evakuasi jaraknya sekira 3 kilometer dari permukiman warga. “Lokasi evakuasi memang sudah ada, namun masih belum memadai. Jaraknya sekira 3 kilometer, dengan jalur yang masih

buruk. Kami sudah coba lakukan simulasi, separoh jalan saja, sudah menghabiskan waktu 30 menit” .

Di Nagari Ampiang Parak ada 4 kampung yang berada di zona merah dan memiliki jalur evakuasi yang lumayan jauh dari pemukiman masyarakat berdasarkan keterangan bapak Yendri selaku Sekretaris Nagari.

Tabel 1.2 Kampung yang berada di zona merah

No	Kampung	Tempat Evakuasi
1	Alai	Bukit batu mandamai
2	Pasar Ampiang Parak	Bukit Panjang
3	Padang Tae	Bukit pantai camin
4	Ujung Air	Bukit pantai camin

BPBD merupakan salah satu badan yang berperan dalam menjalankan program pengurangan resiko bencana berbasis nagari tangguh. karena tugas BPBD bukan hanya membantu masyarakat untuk evakuasi saat terjadi bencana maupun sesudah terjadi bencana, tetapi BPBD juga bertugas dalam mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana. Untuk pengurangan resiko bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan membentuk suatu program yaitu program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan nagari tangguh bencana, di BPBD juga terdapat beberapa masalah dalam menjalankan program pengurangan resiko bencana tersebut, sama dengan yang di ungkapkan oleh Wali Nagari Amping Parak di BPBD juga mengalami kekurangan anggaran, sehingga program tersebut di berhentikan untuk sementara.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu staf di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan yang bernama Angye Kurniawan yang menyatakan:

Program Nagari Tangguh Bencana memang program yang dibuat oleh BPBD di bawah naungan BNPB, program ini sudah dijalankan sekitar 4 tahun, namun yang jadi masalah saat ini yaitu kekurangan anggaran untuk menjalankan program tersebut sehingga program tersebut tidak berjalan untuk sementara, kemungkinan di tahun anggaran yang akan datang program tersebut bisa di jalankan kembali.

Dari permasalahan yang sudah di jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul “ EVALUASI PROGRAM NAGARI TANGGUH BENCANA DI NAGARI AMPIANG PARAK KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut

1. Kurangnya anggaran untuk Program Nagari Tangguh Bencana dari Pemerintah tingkat Kabupaten.
2. Kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah tingkat Kabupaten
3. Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang Program Nagari Tangguh Bencana.
4. Sarana penyelamatan diri yang kurang memadai
5. Nagari Ampiang Parak belum memenuhi semua indikator Desa Tangguh Bencana
6. Kurangnya Sumber daya manusia dalam menjalankan Program Nagari Tangguh bencana di Nagari Ampiang Parak.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Ampiang Parak.
2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat dalam penerapan Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Ampiang Parak

D. Batasan masalah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, dan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti serta luasnya permasalahan, maka peneliti membatasi masalah pada Penerapan Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Penerapan Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat dalam menjalankan Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Ampiang parak.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penerapan Program Nagari Tangguh Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Manfaat praktis

1) Bagi Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan materi tambahan untuk perkuliahan dan memberi tambahan dokumentasi topik-topik skripsi Ilmu Administrasi bagi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi pada khususnya, serta dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.

2) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui dan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman dari permasalahan yang dihadapi selama penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Carl Friedrich dalam Dwiyanto (2009:18), menjelaskan kebijakan merupakan suatu tindakan yang berfokus pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sekaligus mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

United Nation dalam Wahab (2014:9), menjelaskan Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Kebijakan memiliki dua aspek (Ramdhani, 2017), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan

merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagipara pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Agustino (2008:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sedangkan James Anderson (1984) memberikan definisi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Definisi lain mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye, 1995:1).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka mengambil keputusan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan dalam suatu negara.

2. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian pencapaian tujuan melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna untuk membuat keputusan dari suatu program. Evaluasi berguna dalam membimbing pengelolaan, pengumpulan data dan analisis (Lukum 2015). Sedangkan menurut Carol Weiss dalam Wayne Parsons (2005:547), mengatakan bahwa evaluasi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk analisis lainnya berdasarkan enam hal:

1. Evaluasi ditujukan untuk pembuatan keputusan, dan untuk menganalisis masalah seperti yang di definisikan oleh pembuat keputusan, bukan oleh periset
2. Evaluasi yaitu penilaian karakter. Riset bertujuan untuk mengevaluasi tujuan
3. Evaluasi merupakan riset yang dilakukan dalam penetapan kebijakan, bukan dalam pengaturan akademik
4. Evaluasi selalu melibatkan konflik antara periset dan praktisi
5. Evaluasi biayanya tidak dipublikasikan.
6. Evaluasi mungkin melibatkan periset dalam persoalan kesetiaan kepada agen pemberi dana dan peningkatan perubahan sosial.

Stufflebeam dalam Arikunto (2009:2), mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Sedangkan suchman (1961), memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu alat ukur untuk menentukan atau menggambarkan hasil yang telah dicapai dari sebuah proses kegiatan yang sudah direncanakan.

3. Pengertian Program

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama (Arikunto, 2009).

Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan,

2. Terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan,
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut penulis program merupakan suatu pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang melibatkan banyak orang dan program membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pelaksanaannya.

4. Pengertian evaluasi program

Cronbach dan Stufflebeam dalam Arikunto (2009:5), mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sehubungan dengan definisi tersebut *the Stanford Evaluation Consortium Group* menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program.

Spaulding dalam Sukardi (2014:3) mengatakan "*program evaluation is conducted for decision making purpose*". Artinya, evaluasi program dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Namun menurut David dan Hawton dalam Sukardi (2014:3) evaluasi bisa dipandang "..."*as a structured process that creates and synthesizes information intended to reduce uncertainty for stakeholders about a given program or policy*". Artinya, evaluasi program sebagai proses terstruktur yang menciptakan dan menyatukan informasi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian para pemangku kepentingan tentang program dan kebijakan yang ditentukan.

Menurut penulis evaluasi program adalah rangkaian informasi atau penilaian terhadap suatu program yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan publik.

Ada beberapa ahli yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program yaitu Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser. Kaufman dan Thomas dalam Arikunto (2009:40), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*, Model ini dikembangkan oleh Tyler. Pada model ini yang menjadi objek pengamatan adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program.
2. *Goal Free Evaluation Model*, Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif maupun hal-hal yang negatif.
3. *Formatif-Summatif Evaluation Model*, Model ini juga dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang

dilakukan pada waktu program masih berjalan dan ketika program sudah selesai atau berakhir. Model ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan.

4. *Countenance Evaluation Model*, Model ini dikembangkan oleh Stake. Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu Anteseden, Transaksi dan Keluaran.
5. CSE-UCLA Evaluasi Model, ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak.
6. *CIPP Evaluation Model*, model ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata yaitu:
 - 1) *Context evaluation*: evaluasi terhadap konteks
 - 2) *Input evaluation* : evaluasi terhadap masukan
 - 3) *Process evaluation* : evaluasi terhadap proses
 - 4) *Product evaluation* : evaluasi terhadap produk
7. *Discrepancy Model*, model ini dikembangkan oleh Malcolm Probus, model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

Berdasarkan beberapa model evaluasi program diatas penulis tertarik untuk menggunakan model yang keenam yaitu *CIPP Evaluation Model*. Model ini memiliki empat indikator.

Tabel 2.1 Indikator evaluasi program model CIPP

Konteks	Upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.
Input	Masukan dan alternatif apa yang diambil untuk rencana dan strategi untuk mencapai tujuan.
Proses	Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.
Produk	Diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program.

Penulis memilih model CIPP karena model ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator, selain itu model CIPP ini lebih menekankan bagaiman suatu program tersebut berproses, mulai dari kendala yang dihadapi selama program berjalan dan juga program tersebut berhasil atau tidak.

5. Konsep Manajemen Kebencanaan

a. Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Sudibyakto (2011:1), menjelaskan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sedangkan menurut Perry dalam Bevaola Kusumasari (2014:5) memberi arti bencana sebagai peristiwa yang jarang terjadi ketika masyarakat atau subsistem masyarakat yang lebih besar (seperti negara atau komunitas) terganggu secara rasional dan mengalami kerugian secara fisik. Karakteristik utama yang menentukan apakah sebuah kejadian merupakan bencana atau tidak adalah jarak peringatan, besarnya dampak, lingkup dampak, dan durasi dampak.

Noji dalam Bevaola Kusumasari (2014:4) mengartikan bencana sebagai hasil dari kerusakan ekologi yang luas berkaitan dengan manusia dan lingkungannya, kejadiannya serius dan terjadi secara tiba-tiba (atau lambat, seperti dalam peristiwa kekeringan). Dalam skala tersebut, kejadiannya melanda masyarakat secara luas sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal untuk mengatasinya. Sering pula dibutuhkan bantuan pihak luar, bahkan dunia internasional untuk mengatasi kejadian ini.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa bencana adalah sebuah peristiwa alam maupun non alam, yang dampak dari

peristiwa tersebut bisa merugikan manusia, seperti kehilangan nyawa serta kerusakan terhadap harta benda.

b. Pengertian Manajemen Bencana

Shaluf dalam Bevaola Kusumasari (2014:19) manajemen bencana di definisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (common value) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Sedangkan Khan (dalam Alhadi, 2014) menjelaskan pengertian dari manajemen bencana sebagai *“sum total of all activities, programmes and measures which can be taken up before, during and after a disaster with the purpose to avoid a disaster, reduce its impact or recover from its losses.”* Untuk mencari solusi atas persoalan bencana yang merupakan masalah publik, maka dibutuhkan manajemen bencana agar dampak buruk dari bencana bisa direduksi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat peneliti simpulkan, manajemen bencana adalah suatu perencanaan yang terstruktur untuk merespon terjadinya bencana, mulai dari pencegahan bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana.

c. Tujuan Manajemen Bencana

Tujuan manajemen bencana secara umum dalam UU No. 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban.
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transpotasi, air minuman, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan manajemen secara sederhana adalah untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh bencana.

d. Pengertian Pengurangan Resiko Bencana

John Twigg (dalam Ichwan Muis,2018), Pengurangan Resiko Bencana diartikan sebagai sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi,

menilai, dan mengurangi risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana sekaligus meniyasati bahaya lingkungan serta bahaya lain yang memicunya. Sedangkan Jonatan Lassa (dalam Ichwan Muis,2018) menjelaskan pengertian Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas untuk mengelola bencana di tingkat lokal.

Menurut penulis, Pengurangan Resiko Bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengkaji dan mengurangi resiko yang akan ditimbulkan oleh bencana. Upaya tersebut memerlukan Partisipasi dari masyarakat dalam menganalisis segala resiko bencana yang ada di wilayahnya, oleh sebab itu, dalam Pengurangan Resiko Bencana harus melibatkan kelompok masyarakat, karena masyarakat lebih paham dan mengenal daerah serta bencana yang rentan terjadi di daerahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Barry Adhitya (dalam ichwan Muis,2018) memberikan alasan pengurangan risiko bencana agar berbasis komunitas (masyarakat). Pengurangan risiko diharapkan berbasis komunitas dikarenakan beberapa alasan,yaitu:

1. Masyarakat yang pertama kali mengalami bencana. (Mereka ada digaris depan), maka perlu kemampuan merespon bencana secara cepat sebelum bantuan dari luar datang.
2. Sebagian besar pertolongan datang terlambat, mereka harus menolong dirinya sendiri pada waktu-waktuemas(*goldentime*).

3. Masyarakat adalah pihak yang paling mengenali tingkat kerusakan/kehilangan akibat bencana.
4. Pendekatan top-down gagal mengenali kebutuhan local masyarakat yang rentan mengabaikan kapasitas dan sumber daya yang potensial, dan di beberapa kasus meningkatkan kerentanan.

Barry (dalam Ichwan Muis, 2018) juga menjelaskan Ketika anggota masyarakat terlibat aktif bahkan menjadi penentu dalam pengelolaan bencana, maka masyarakat harus mengenali risiko akibat adanya bencana yang akan ditanggungnya. Terlibat dalam pembuatan keputusan; terlibat dalam membangun kembali dari kerusakan atau kehilangan, melakukan jejaring dengan pemerintah. Maksud yang tersirat dalam konsep “berbasis komunitas/masyarakat” adalah bahwa pekerjaan penanggulangan bencana dilaksanakan bersama dengan komunitas dimana mereka mempunyai peran kunci dalam penyelenggaraannya.

Pemerintah dapat memberi peluang bagi LSM, Organisasi masyarakat, dan pihak lainnya untuk berperan aktif dalam pengurangan resiko bencana serta pengembangan Desa/Nagari tangguh bencana. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana/PRB atau tim relawan PB berbasis komunitas desa/kelurahan. Kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa/kelurahan, baik kelompok berbasis

teritorial maupun sektoral/kategorial. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, tetapi pemerintah desa terlibat di dalamnya bersama dengan unsur-unsur masyarakat sipil.

e. Pengertian Nagari Tangguh Bencana

Desa/Nagari Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau Nagari yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. (Dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana). Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria berdasarkan indikatornya, yaitu:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama

- a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan.
- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- c. Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.

- d. Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
- e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan.
- f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya

- a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa/kelurahan.
- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.
- c. Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.
- d. Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.

- e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
- f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama

- a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa/kelurahan.
- b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB.
- c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
- d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan PB Desa/Kelurahan.
- e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
- f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

6. Konsep Analisis SWOT

Dalam (Salusu:2015) Analisis SWOT adalah suatu metode dalam perencanaan strategi yang dipakai untuk mengidentifikasi 4 faktor utama yang memengaruhi kegiatan di dalam organisasi sepanjang masa. SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya. Beberapa elemen penting yang dipandang penting sebagai kekuatan antara orang lain, lokasi yang strategis dengan kemudahan transportasi dan komunikasi, keamanan yang terjamin, dukungan dari DPR/DPRD, visi dan misi yang mampu mendarat dalam hati masyarakat, atau seluruh komponen organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dll. Dari segi organisasi antara lain seperti struktur organisasi yang tangguh, administrasi yang rapi dengan penjabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dan dengan jarak kendali yang memadai, semua karyawan memahami tugasnya, memahami makna pelayanan yang bermutu, dan bersedia meningkatkan kualitas produk dan pelayanan.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Dalam mengidentifikasi kelemahan adalah dengan memakai TKP. Kelemahan suatu organisasi tidak boleh dibiarkan sepanjang perbaikan dapat dilakukan. Kelemahan-kelemahan yang pada umumnya

sirasakan oleh suatu organisasi antara lain yaitu lokasi yang jauh dari jangkauan fasilitas umum, seperti jalan raya, telepon, listrik, dan air minum serta sumber daya manusia yang lemah, keuangan , dan sebagainya.

3. Peluang (*Opportunities*)

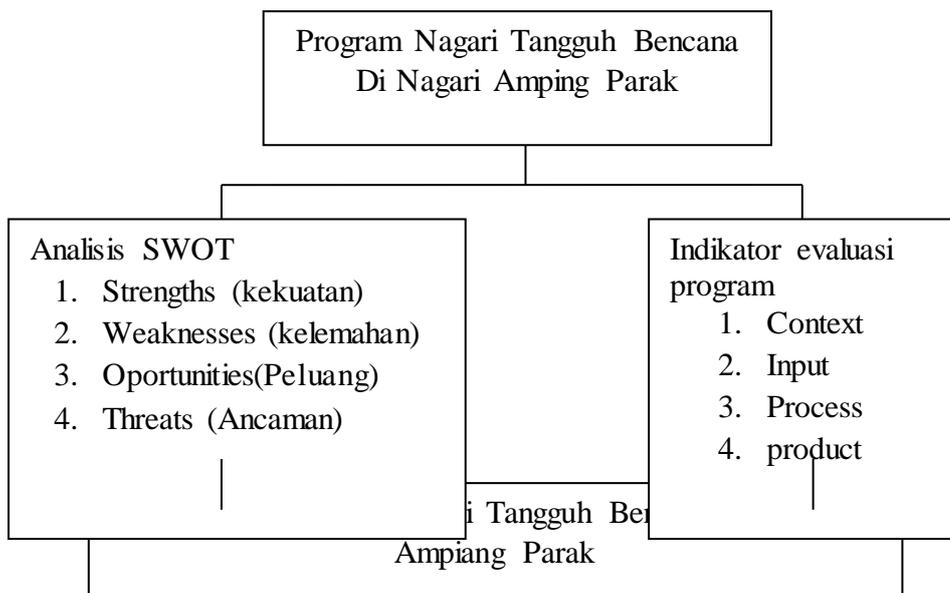
Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu organisasi serta kecenderungan kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam organisasi yang bersangkutan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori di atas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:



Berdasarkan kerangka konseptual di atas penulis akan melakukan Analisis SWOT terlebih dahulu terhadap program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Ampiang Parak, kemudian penulis melakukan evaluasi terhadap Program Nagari Tangguh Bencana tersebut dengan menggunakan indikator evaluasi program CIPP (Context, Input, Process, Product).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik dua kesimpulan:

1. program pengurangan resiko bencana di Nagari Ampiang Parak belum berjalan secara optimal, karena kurangnya pelatihan yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana terhadap masyarakat tentang pengurangan resiko bencana, sedangkan dari pihak nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana dengan SDM yang terbatas. Karena SDM di Nagari Ampiang Parak masih minim dalam menjalankan pelatihan terhadap masyarakat maka pelatihan jarang dilakukan, adapun pelatihan yang dilakukan sangat jarang dan pihak nagari juga harus mengundang narasumber dari BPBD atau orang yang ahli dalam bidang kebencanaan. keterbatasan anggaran juga mengakibatkan program tidak terlaksana karena untuk menjalankan program membutuhkan biaya yang besar termasuk dana yang harus dikeluarkan untuk membayar narasumber yang di undang untuk menjalankan program tersebut.
2. Kekuatan dari program ini yaitu sumber daya manusia yang sudah mecukupi untuk menjalankan program ini karena di nagari ampiang parak sudah memiliki forum PRB, meskipun anggota dari KSB masih kurang, namun sumber daya manusia untuk menjalankan program pengurangan

resiko bencana masih terpenuhi karena dibantu oleh tim PB dari setiap kampung di nagari ampiang parak. Kelemahan dari program ini yaitu keterbatasan dana/anggaran yang mengakibatkan program tidak bisa berjalan dengan optimal, selain itu masih kurangnya fasilitas dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Peluang dari program ini pemanfaatan ekowisata sebagai pengurangan resiko bencana, yang sering dilakukan Nagari Ampiang Parak yaitu mengajak masyarakat untuk menanam pohon mangrove di sepanjang pantai di kawasan konservasi penyu, hal ini dapat di jadikan salah satu upaya yang dilakukan oleh Nagari Ampiang Parak dalam menjalankan program pengurangan resiko bencana, selain untuk menarik wisatawan pohon mangrove juga bisa menjadi sarana pengurangan resiko bencana. Sedangkan ancaman dari program ini yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menyikapi kondisi Kabupaten Pesisir Selatan yang rawan bencana, terutama di nagari ampiang parak yang terletak di garis merah atau rentan terhadap bencana, masyarakat masih kurang memahami tindakan apa yang harus diambil jika suatu saat terjadi bencana, tempat evakuasi di nagari ampiang parak luman jauh, akan tetapi masyarakat harus tau kemana arah evakuasi terdekat jika bencana terjadi sehingga dapat mengurangi dampak dari resiko bencana tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran, sebaiknya anggaran untuk program Nagari

tangguh bencana ini lebih diperhatikan dan dipenuhi, dan pihak BPBD ataupun lembaga yang bergerak dalam bidang kebencanaan harus lebih giat lagi melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang pengurangan resiko bencana, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak mengerti tentang pengurangan resiko bencana, program ini sangat membantu pengetahuan masyarakat sehingga mereka bisa melakukan evakuasi mandiri sehingga bisa mengurangi dampak dari resiko bencana, selain itu fasilitas pun hendaknya harus dilengkapi agar program bisa berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino Leo.2008.Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung:Alfabeta
- Arikunto Suharsimi,Dkk.2009.Evaluasi Program Pendidikan.Jakarta.Bumi Aksara
- Basrowi,Dkk.2008.Memahami Penelitian Kualitatif.Jakarta:Rineka Cipta
- Bevaola Kusumasari.2014.Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintahan Lokal.Yogyakarta:Gava Media
- Dwiyanto Indiahono.2009.Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.Yogyakarta:Gava Media
- Moleong Lexy J.1988.Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung:Remaja rosdakarya
- Salusu.2015.Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit.Jakarta:Grasindo
- Sudibyakto.2011.Manajemen Bencana Di Indonesia Ke Mana.Yogyakarta:Gajah Mada University PRESS
- Sugiyono.2012.Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D .Bandung: Alfabeta
- Sukardi.2014.Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan.Yogyakarta:Bumi Aksara
- Wahab Solihin Abdul.2014.Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta:PT Bumi Aksara
- Yusuf Muri.2007.Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah). Padang:UNP Press

Sumber jurnal

- Ichwan Muis,Dkk.2018.Model Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Asian Social Work Journal. Volume 3, Issue 4,September 2018e-ISSN : 0128-1577.
- LukumAstin .2015.Evaluasi Program Pembelajaran Ipa SmpMenggunakan Model Countenance Stake .Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikanvolume 19, No 1, (25-37)
- Pramono Spto dan Yusuf, 2015,Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Di Desa Boboh Kecamatan Menganti)Jurnal Ilmu Administrasi Volume XII Nomor 1.
- Ramdhani Abdullah,Dkk.2017.Konsep UmumPelaksanaan Kebijakan Publik. JurnalPublikVol.11; No. 01; 1-12
- Zikri Alhadi. 2014. Kesiapan Jalur Dan Lokasi Evakuasi Publik Menghadapi ResikoBencana Gempa Dan Tsunami Di Kota Padang(Studi Manajemen Bencana). *Humanus, Volume. XIII Nomor.1*

Dokumen dan Undang-Undang

Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Umum Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penanggulangan
Bencana

Peraturan Nagari Ampiang Parak No 02 Tahun 2019 Tentang Sarana dan
Prasarana Penanggulangan Bencana Nagari

Peraturan Nagari Ampiang Parak No 03 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Peraturan Nagari Ampiang Parak No 04 tahun 2019 tentang Pengembangan
Ekowisata Berbasis Pengurangan Resiko Bencana